



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : *KAMIS*

Tanggal : *18*

Bulan : *JUNI*

Tahun : *2015*

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## PENERTIBAN DI MONAS

# PKL Serang Satpol PP, 1 Petugas Terluka

JAKARTA (Suara Karya); Upaya penertiban di kawasan Monumen Nasional (Monas) kembali berujung bentrok. Sekitar 100 personel Satpol PP yang sedang bertugas diserang ratusan pedagang kaki lima (PKL). Satu orang petugas Satpol PP mengalami luka serius di bagian tangannya akibat terkena pecahan piring.

"Tiba-tiba ratusan PKL yang membawa golok dan pecahan piring menyerang kami. Seorang petugas bernama Idris terpaksa dibawa ke RSCM untuk diobati luka-lukarnya," kata Maruli Sijabat, Kepala Seksi Operasional Satpol PP Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Bentrokan itu terjadi sekitar pukul 18.00. Saat itu, ratusan Satpol PP tengah

menggelar penertiban rutin untuk menciptakan kawasan Monas yang tertib dan nyaman bagi pengunjung. Mendadak muncul ratusan PKL yang langsung melempari petugas dengan pecahan piring. Untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa, akhirnya Satpol PP memilih mundur.

"Kita harus mundur sementara waktu, besok harus dilakukan koordinasi lagi terlebih dahulu. Kita juga harus koordinasi dengan jajaran kepolisian dan instansi lainnya terlebih dahulu," ujar Maruli.

Saat ini kondisi sekitar pintu timur Monas masih sangat ramai PKL. Pintu tersebut tampak sudah terbuka lebar dengan kondisi gembok yang rusak. (dwi)



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : KAMIS

Tanggal : 18

Bulan : JUNI

Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Ahok : Doa'in Orang Batak Jadi Gubernur DKI

Jakarta, SENTANA

**GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mendoakan agar suku Batak ikut maju dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Pernyataan tersebut diucapkan saat berziarah di Taman Makam Pahlawan Dalam Rangka HUT DKI ke-488.**

"Sekali-kali, orang Batak dong yang jadi gubernur DKI," ujarnya di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (16/6).

Ahok menantang suku Batak Karo maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) ibukota pada 2017 mendatang.

Kejadian tersebut bermula, saat Anggota DPRD DKI, Bestari Barus mendapat giliran menaburkan bunga di atas makam almarhum eks Gubernur DKI, Wiyogo Atmowiloto.

"Masa (orang Batak) kalah sama orang Belitung Timur," sindirnya.

Bestari pun menimpali dengan mengatakannya, "Didoain jadi gubernur nih. He-he-he."

Sekedar diketahui, Bestari Barus merupakan politikus Nasdem yang berasal dari suku Batak Karo. #HSH





Hari : **KAMIS**      Tanggal : **18**      Bulan : **JUNI**      Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

# Sistem Tunjangan Pegawai DKI Diubah

**"Kami menyebutnya dengan istilah persekot atau *down payment*."**

**Gangsar Parikesit**

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** - Pemerintah DKI Jakarta mengakhiri sistem tunjangan kinerja dinamis bagi para pegawainya. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, sistem tunjangan diubah mengikuti saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang sistem tunjangan dinamis tersebut. "Mulai bulan depan," kata Basuki di Balai

Kota kemarin.

Dia mengatakan sistem tunjangan kinerja baru tersebut sudah berjalan dan besarnya akan mulai dihitung kembali pada bulan depan. "Pegawai akan langsung mendapatkan tunjangan kinerja pada awal bulan," kata Basuki.

Dalam sistem tunjangan kinerja yang baru itu, kata Basuki, pembayaran tunjangan sekitar tanggal 1-5. Besarnya akan disesuaikan dengan jabatan masing-masing pegawai. "Kami menyebut-

nya dengan istilah persekot atau *down payment*," ucapnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi besarnya tunjangan tersebut, kata Basuki, akan disesuaikan dengan kinerja pegawai. Jika kinerjanya rendah, pegawai tersebut pada bulan depan akan mendapatkan tunjangan lebih rendah dibanding yang dibayarkan pada bulan ini. "Tunjangan bulan depan dipotong karena penilaiannya defisit."

Menurut Basuki, dengan sistem tunjangan baru tersebut, pegawai akan lebih termotivasi untuk bekerja. Justru dengan mekanisme tunjangan yang lama,

banyak pegawai yang rajin ini terhadap pegawai yang malas. "Karena pegawai malas bisa mendapatkan tunjangan yang besar," ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika menuturkan, dalam pembayaran tunjangan dengan mekanisme yang baru, lembaganya akan memberikan peringkat berdasarkan evaluasi dan sistem. "Seluruh pejabat baik fungsional maupun umum, punya pemeringkatan," ujarnya.

Setiap tanggal 29, kata Agus, lembaganya akan menilai kinerja pegawai. Jika kinerjanya sesuai, untuk bulan depan tak

ada pemotongan tunjangan. Namun jika tak sesuai dengan target, akan ada pemotongan tunjangan pada bulan berikutnya.

Agus menjelaskan, setiap komponen penilaian akan dikalikan Rp 18 ribu. Sedangkan menurut Basuki, angka itu merupakan asumsi jika seluruh pekerja mampu mencapai target 100 persen. "Namun realitasnya tak ada pegawai yang kinerjanya bisa mencapai 100 persen," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Heru Budi Hartono mengatakan salah satu tujuan perubahan mekanisme pemberian tunjangan kinerja ialah agar tunjangan tersebut jatuh pada orang yang tepat. "Kami ingin melakukan efisiensi, memang ada pegawai yang tak kerja bisa menerima tunjangan hingga Rp 9 juta," kata dia.

Menurut Camat Senen, Masroni, sistem pembayaran tunjangan kinerja tersebut harus diiringi dengan indikator penilaian kinerja yang jelas dan terukur. Selama ini terjadi kekurangan pembayaran tunjangan kinerja dinamis karena tak ada indikator penilaian yang jelas. "Akhirnya banyak pegawai yang kinerjanya tak maksimal."

Bahkan, kata dia, banyak pegawai dari satuan kerja perangkat daerah akhirnya bekerja hanya berdasarkan tugas pokok dan fungsi tanpa adanya inovasi. Jika indikator penilaian jelas, banyak SKPD akan berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerjanya. "Saya harap hal ini bisa segera terealisasi." ●

## GAJI SELANGIT PEGAWAI DKI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Christandi menyurat Pemerintah Provinsi DKI terkait dengan tingginya tunjangan yang didapat pegawai di sana. Menteri Yuddy meminta besaran tunjangan yang dikeluarkan DKI tak boleh melebihi penghasilan yang dimiliki Kementerian Lembaga di Ibu Kota.

### Pegawai Negeri DKI

Tertinggi	Rp 96.000.000
Terendah	Rp 9.592.000

### Kementerian Keuangan

Tertinggi	Rp 46.960.000
Terendah	Rp 2.575.000

### Badan Pemeriksa Keuangan

Tertinggi	Rp 41.550.000
Terendah	Rp 1.540.000

### Tunjangan Kerja Dinamis DKI

Lurah	Rp 13.185.000
Camat	Rp 13.980.000
Kepala Biro	Rp 27.900.000
Kepala Dinas	Rp 29.925.000
Kepala Badan	Rp 31.455.000
Sekretaris Daerah	Rp 96.000.000

Diteruskan / Kep





**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **KAMIS**

Tanggal : **18**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, **27**, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

# Kinerja Inspektorat DKI Dipertanyakan

**GAMBIR** - Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) beberapa kali mengungkapkan kekecewaan terhadap para pejabat pemprov. Mulai lelet, pungutan liar (pungli), hingga pemerasan. Lalu, apa peran inspektorat yang ditugasi mengawasi PNS?

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan kinerja Inspek-

torat DKI. Seharusnya, kata dia, dengan adanya inspektorat, semakin sedikit pejabat pemprov yang terlitit persoalan hukum. Kedisiplinan mereka pun meningkat karena selalu dipantau lembaga itu.

Faktanya berbicara lain. Alih-alih memuaskan warga, para pejabat Pemprov DKI malah sibuk dengan persoalan hukum.

Ditambah masih ramsinya laporan soal praktik pungli di beberapa SKPD. "Sebab, inspektorat *nggak* gerak. Seharusnya lebih lincah," tegas Uchok kemarin (17/6).

Inspektorat, lanjut dia, seharusnya tidak bergerak hanya saat ada pejabat DKI yang tersangkut hukum. Mereka harus memantau mulai perencanaan program hingga pelelangan. Caranya,

inspektorat aktif mengawasi para pejabat pemprov.

Selain itu, lanjut Uchok, inspektorat harus mengawasi tiap-tiap instansi pelayanan secara maksimal. Misalnya, badan pelayanan terpadu satu pintu (BPTS) dan balai uji kir. "Kan masih banyak laporan pungli yang dilakukan oknum PNS. Memang *nggak* ada pengawasan," ujarnya.

Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun membenarkan masih banyak laporan dugaan pelanggaran oleh PNS. Namun, Lasro membantah bila lembaganya disebut tidak bergerak menekan pelanggaran dan meningkatkan kedisiplinan PNS. "Kami pantau semua kok. Hasilnya kayak *gimana*, kami tidak bisa bocorkan," terangnya. (fai/co1/ind)



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : KAMIS

Tanggal : 18

Bulan : JUNI

Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

# JABATAN RT/RW “ DILARANG SEUMUR HIDUP”

Hanya Dua Periode,  
Pendidikan Minimal Lulus SMP

JAKARTA (Pos Kota) - Masa jabatan ketua RT/RW di Jakarta kini tidak bisa lagi seumur hidup. Untuk penyegaran dan gerak perubahan di lingkungan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta membatasi pengurusan RT/RW maksimal hanya dua periode saja.

Peliput: John

“Dulu tidak ada batas waktu, sekarang hanya dua periode. Minimal pendidikan lulus SMP, dulu banyak juga yang tidak bisa membaca. Persyaratan ini supaya RT/RW bisa mengikuti perubahan,” ujar Bambang

Sugiyono, Asisten Pemerintahan Sekdaprov DKI Jakarta, Rabu (17/6).

Bambang mengaku, sosialisasi terkait pembatasan masa jabatan RT/RW tersebut sudah dilakukan di seluruh wilayah. Untuk RT/RW yang belum berakhir masa tugasnya, pihaknya

menunggu perodesasinya habis terlebih dahulu.

Sedangkan untuk meningkatkan kinerja RT/RW pihaknya melakukan pembinaan administrasi dan keuangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 168/2014 tentang Pedoman RT/RW.

“Pembinaan keuangan operasional RT/RW agar pengurus dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi,” harapnya.

**REKENING KHUSUS**  
Ia menambahkan, setiap

pengurus RT/RW juga akan mempunyai rekening khusus yang bisa digunakan untuk operasional RT/RW.

“Anggaran ini bisa digunakan untuk rapat dan kerja bakti. Bisa juga beli pulsa untuk menghubungi lurah dan camat,” tegasnya.

Bambang menjelaskan, dalam waktu dekat ini pemprov dan Bank DKI akan membuat rekening yang secara serentak akan digunakan untuk transfer uang operasional RT/RW. (st)





# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **KAMIS**

Tanggal : **18**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

# Penggusuran tanpa Solusi Berdampak Konflik

**MARAKNYA** penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memuat sorotan banyak pihak. Terlebih, penggusuran dilakukan sebelum dibangunnya rumah susun (rusun) yang jadi relokasi bagi korban gusuran. Sebagai bentuk penyelesaian masalah ini, DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Perumahan dan Gedung Pemda serta wali kota dari lima wilayah DKI.

Para wakil rakyat itu juga meminta penggusuran di Ibu Kota dihentikan sampai terwujudnya rusun yang memadai. "Banyak masyarakat korban penggusuran mengadu ke DPRD. Mereka merasa dipertukarkan tidak adil karena digusur tanpa diberikan solusi. Jadi kami memanggil pihak terkait untuk menjelaskan masalah ini," ujar Riano P. Ahmad, Ketua Komisi A DPRD DKI, saat memimpin rapat pemanggilan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda serta instansi terkait terkait penggusuran oleh DPRD, di Ruang Rapat Komisi A, Rabu (17/6) w

Riano juga meminta, penggusuran tidak dilakukan secara semena-mena. Terlebih, selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini untuk menghormati masyarakat yang memusatkan ibadah. Karena itu, politisi PPP ini meminta, penggusuran dihentikan sementara selama Ramadan. Lantaran jika tetap dipaksakan bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

"Sudah banyak masyarakat mengancam akan melawan secara fisik jika aparat memaksakan penggusuran. Hal ini tentu tidak kita harapkan, karena bisa menimbulkan jatuhnya korban," cetusnya juga.

Lebih jauh, Riano juga menyoroti maraknya sengketa lahan yang juga ter-

jadi di tengah masyarakat Jakarta.

Menurutnya, banyak lahan milik masyarakat diseroke oleh kelompok tertentu dengan bantuan oknum lurah dan camat. Mereka diindikasikan terlibat permainan dengan para mafia pertanahan. "Pada satu sisi penggusuran kepada warga miskin digencarkan, namun pada sisi lain juga ada pembiaran pada sepak terjang para mafia tanah," sindirnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Ika Lestari Aji yang hadir dalam rapat itu mengakui belum memadainya jumlah rusun yang ada di DKI untuk relokasi korban gusuran. Namun, pihaknya berusaha terus melakukan pembangunan. Tahun depan, ujar Ika juga, pihaknya tengah membangun sedikitnya 10 tower rusun di Kampung Bandan, Jakarta Utara.

"Satu tower minimal 270 unit dengan 16 lantai," terangnya. Dia juga mengharapkan, pembangunan rusun ini dapat dilakukan mulai awal 2016 mendatang. Namun, Ika belum bisa memberi kepastian mengenai wacana tersebut. Tak hanya itu, Ika juga mengaku belum mengetahui perencanaan anggaran yang akan dibuat untuk pembangunan rusun ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi yang juga hadir di kegiatan itu, mengaku akan tetap melakukan penggusuran. Hal ini sesuai permintaan Bank Dunia yang memberikani pinjaman Rp 1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI) normalisasi dan rehabilitasi 13 sungai dan lima waduk di Jakarta.

Saat ini pihaknya tengah gencar meng-

gusur kawasan jalan Rawajati Barat, RT 09/04, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. "Mereka sudah puluhan tahun menempati tanah tersebut, tak ada toleransi," tegasnya. Tri menuntukan, lokasi tersebut adalah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Lokasi itu seharusnya digunakan sebagai jalur hijau. "Itu seharusnya bersih dari bangunan," ujarnya. Para penghuni sudah menempati lahan itu selama puluhan tahun. Terkait tuntutan warga, Tri menjelaskan pihaknya memiliki data dari warga yang bakal digusur dan telah menyerahkannya ke Dinas Perumahan.

Dia juga mengakui akan memfasilitasi keinginan warga yang ingin pindah ke rusun yang sedang dibangun pemerintah daerah (pemda) DKI. (wok)





Hari : **KAMIS**

Tanggal : **18**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, **25**, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

**RELOKASI WARGA**

## Perhatikan Nasib Warga Pasca Relokasi

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan nasib warga sesuai relokasi ke rumah susun. Perhatian yang dimaksud terutama pada kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi indikator kesejahteraan warga.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdurahman Suhaini, dalam rapat Komisi A dan Komisi D DPRD dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, Rabu (17/6), mengatakan, selain kemudahan akses ke lokasi kerja, kondisi sosial ekonomi warga juga perlu perhatian. "Jangan sampai setelah pindah ke rusun (rumah susun), warga malah terpuruk," ujarnya.

Sekretaris Komisi A dari Fraksi Gerindra Syarif meminta Pemprov DKI memperhatikan kesiapan rusun untuk dihuni sebelum membongkar bangunan. Dia menilai data yang menjadi acuan dalam penertiban lahan belum sinkron sehingga kerap muncul gejala.

Panji Virgianto dari Fraksi PDI-P juga menyuarai kesiapan rusun. Dia meminta dinas perumahan melarutkan rencana penambahan menara-menara baru untuk meningkatkan kapasitas tampung. Terlebih, jumlah pasokan dan kebutuhan rumah khususnya bagi warga menengah bawah masih timpang.

Hal menotjol yang sering dikeluhkan warga adalah lokasi rusun dan akses transportasi. Sebagian warga sasaran program di pinggir Waduk Pluit dan Sungai Ciliwung di Pinangsi dan Ancol, misalnya, menolak pindah ke Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, dengan alasan jauh dari lokasi kerja. Akses transportasi umum juga terbatas.

### Lipat gandakan rusun

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan, proses relokasi selama ini selalu mempertimbangkan kesiapan rusun. Pemindehan dilakukan setelah rusun siap. Namun, prosesnya dipercepat agar rusun be-

nar-benar tepat sasaran.

Selain itu, jumlah rusun dilipatgandakan dengan membangun menara-menara baru, baik dengan anggaran pemerintah maupun dana swasta melalui penagihan kewajiban pengembang. Tahun ini, proyek rusun di delapan lokasi yang telah dilelang diharapkan segera terwujud. Tahun depan jumlahnya ditargetkan 41 lokasi.

"Bersama instansi lain, seperti Dinas Usaha Kecil Menengah, kami latih warga penghuni rusun beragam keterampilan. Kami salurkan ke lapangan kerja dan permudah akses ke transportasi umum," kata Ika.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengakomodasi seluruh warga di lokasi pengosongan lahan ke rumah susun. Cara pemindahan selama ini dianggap mempunyai celah dan dimanfaatkan sebagian warga untuk mengeruk keuntungan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, selama ini Pemprov DKI menyediakan rumah susun sebanyak jumlah keluarga yang akan direlokasi dari bantaran sungai atau waduk. Namun, setelah beberapa bulan pindah, mereka mengalihkan dan menjual unit rusun ke orang lain.

"Mereka ini (pelaku jual beli rusun) tidak mau mengganti KTP (kartu tanda penduduk). Artinya, mereka tidak mau ikut aturan kami. Karena itu, kami lebih selektif lagi, yakni hanya mereka yang mau ganti KTP dan benar butuh rumah yang kami akomodasi," ujarnya.

Cara baru ini diterapkan pada proses relokasi warga di pinggir Kali Sekretaris dan Kali Mookervart di Jakarta Barat. "Pada pendataan awal ada 1.000 orang. Namun, setelah diseleksi hanya sekitar 200 warga yang memenuhi syarat," ujarnya.

Selain selektif dalam proses pengisian, dinas juga mengunggah data penghuni rusun yang merupakan pemegang hak sewa ke situs [smartcityjakarta.go.id](http://smartcityjakarta.go.id) untuk memudahkan pengawasan. (MKN)



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **KAMIS**

Tanggal : **18**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,	Kolom :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
-----------	--	---------	----------------------------

## Kasatpol PP DKI, Kukuh Hadi Santosa **Sanksi Tegas Satpol PP yang Jadi Beking Tempat Hiburan**

RATUSAN personel yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya (PMJ) akan menggelar operasi gabungan untuk pengawasan operasional tempat hiburan selama bulan Ramadan 1436 H.

"Kita bertugas berkeliling mengawasi tempat hiburan di Jakarta setiap hari selama Ramadan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI, Kukuh Hadi Santosa, saat memimpin apel pengawasan tempat hiburan malam di halaman Balaikota, Rabu (16/6) sore.

Ia mengatakan, personel gabungan bertugas mengawasi penegakan aturan terkait pembatasan operasional tempat hiburan di lima wilayah Jakarta selama Ramadan.

Sebelumnya pula, Disparbud DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi pemasangan stiker ke seluruh tempat hiburan malam yang terdiri dari panti pijat, karaoke, disko/klub, bar dan bola ketangkasan. "Disparbud sudah jelas mengatur, tempat hiburan mana yang boleh atau dilarang beroperasi selama bulan puasa," ujar Kukuh.

Kukuh meminta kepada seluruh personel gabungan dapat mengemban tugas mengawasi operasional tempat hiburan malam di ibu kota selama bulan Ramadan.

"Saya mohon laksanakan tugas ini sebaik mungkin. Jangan sampai kita mentolerir hal-hal yang sudah ditegaskan sesuai aturan.

Kita laksanakan tugas ini bersama sehingga tidak ada yang bermain. Semua pihak bisa terlibat, memandang mana yang tidak konsisten dalam penegakan aturan hukum," pintunya.

Kukuh pun mengancam akan menjerat sanksi tegas untuk petugas Satpol PP yang terbukti membekingi pelanggaran tempat hiburan malam selama Ramadan.

"Sebanyak 405 personel gabungan dikerahkan untuk mengawasi lima wilayah kota setiap malam," ucapnya. (BCR)







**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **KAMIS**

Tanggal : **18**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

**BULAN RAMADHAN**

## Bekingi Pelanggaran, Anggota Satpol PP Kena Sanksi Berat

JAKARTA (Suara Karya): Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang terbukti membekingi pelanggaran tempat hiburan malam dipastikan mendapat sanksi tegas. Jangan sampai berbagai pelanggaran selama bulan puasa ini memicu kemarahan masyarakat sehingga mereka turun ke jalan main hakim sendiri.

Hal itu ditegaskan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso pada apel upacara pengawasan tempat hiburan malam di bulan Ramadhan. "Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) sudah jelas mengatur, tempat hiburan mana yang boleh atau dilarang beroperasi selama bulan puasa," ujar Kukuh di halaman Balai Kota, Kamis (17/6) petang.

Intinya, petugas pengawasan hiburan tidak bertoleransi terhadap pelanggaran dalam bentuk apapun. "Kalau sampai ada oknum terlibat membekingi atau membiarkan pelanggaran, apasti saya tindak tegas, termasuk pengelola hiburan bisa dikenakan tindak pidana maupun administrasi," kata Kukuh saat memimpin apel upacara yang dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Purba Hutapea, perwira Polda Metro Jaya, dan sejumlah pejabat wilayah.

"Tiap malam kami akan kerahkan 405 personel gabungan untuk mengawasi lima wilayah kota. Kalau ada diskotek, panty pijat, bar, maupun permainan bola tangkas yang nekat buka, harus ditutup. Kalau perlu disegel atau diusulkan untuk dicabut izin usahanya," ucap Kukuh menambahkan Disparbud telah menempelkan stiker ke seluruh tempat hiburan malam, mana yang boleh buka dan tutup.

Purba menambahkan tempat hiburan yang berdiri sendiri diwajibkan tutup selama satu bulan penuh. Sedangkan tempat hiburan yang merupakan fasilitas hotel bintang satu sampai lima hanya dibatasi jam operasionalnya yakni dari jam 20.30 sampai 01.30. "Tapi semua tempat hiburan malam wajib tutup pada hari tertentu, seperti sehari sebelum dan sesudah puasa pertama, malam Nuzulul Quran, dan H-2 sampai H+2 Lebaran," kata Purba.

Dispasbud DKI telah melakukan sosialisasi surat edaran (SE) terkait waktu operasional industri pariwisata di Ibu Kota saat Ramadan dan Idul Fitri.

(yon)

Intruksi / Informas

Diteruskan / Kepada



# GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : KAMIS

Tanggal : 18

Bulan : JUNI

Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Satpol PP Bekingi Tempat Hiburan Ditindak

**GAMBIR (Pos Kota)** - Anggota Satpol-PP DKI Jakarta yang terbukti membekingi pelanggaran tempat hiburan malam dipastikan mendapat tindakan tegas. Jangan sampai berbagai pelanggaran selama bulan puasa ini memicu kemarahan masyarakat, sehingga mereka turun ke jalan main hakim sendiri.

Hal itu ditegaskan Kasatpol-PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Susanto pada apel upacara pengawasan tempat hiburan malam di bulan puasa. "Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) sudah jelas mengatur tempat hiburan mana yang boleh atau dilarang beroperasi selama bulan puasa," ujarnya, Rabu (17/6).

Intinya, petugas pengawasan hiburan tidak bertoleransi terhadap pelanggaran dalam bentuk apapun. "Kalau sampai ada oknum terlibat membekingi pelanggaran saya tindak tegas, termasuk pengelola hiburan bisa dikenakan tindak pidana maupun administrasi," kata Kukuh pada apel upacara yang dihadiri Kadisparbud DKI Jakarta, Purba Hutapea, perwira Polda Metro Jaya, dan sejumlah pejabat wilayah.

"Tiap malam kami akan kerahkan 405 personil gabungan untuk mengawasi lima wilayah kota. Kalau ada diskotek, panti pijat, bar, maupun permainan bola tangkas yang nekat

buka, harus ditutup. Kalau perlu disegel atau diusulkan untuk dicabut izin usahanya," tandas Kukuh, seraya menambahkan, Disparbud telah menempelkan stiker ke seluruh tempat hiburan malam, mana yang boleh buka dan tutup.

Purba menjelaskan, tempat hiburan yang berdiri sendiri diwajibkan tutup selama sebulan penuh.

Sedangkan tempat hiburan yang merupakan fasilitas hotel bintang satu sampai lima hanya dibatasi jam operasionalnya yakni dari pukul 20.30 sampai 01.30. "Tapi semua tempat hiburan malam wajib tutup pada hari tertentu, seperti sehari sebelum dan sesudah puasa pertama, malam Nuzulul Quran, dan H-2 sampai H+2 Lebaran," ucapnya. (joko/st)